

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



SEMINAR NASIONAL

Bimbingan Konseling

FIP UNP



Pengembangan Sikap Kerja Keras, Disiplin dan Kejujuran Peserta Didik

Strategi Membangun Karakter Bangsa Dalam Menghadapi Tantangan Di Masa Depan

**Strategi Membangun Karakter Penyandang Cacat
Dalam Menghadapi Tantangan Di Masa Depan**

*(Pengembangan Kerja Keras, Disiplin dan Kejujuran
dalam Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus)*



Drs. Tarmansyah, Sp.Th., M.Pd.

Aula Engku Syafei LPMP Sumatera Barat
10 Januari 2009

STRATEGI MEMBANGUN KARAKTER PENYANDANG CACAT DALAM MENGHADAPI

Oleh: Tarmansyah, Sp.Th, M.Pd

ABSTRAK

Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan pendidikan bagi penyandang cacat, khususnya di Sumatera Barat, Guru-guru belum memahami strategi mempersiapkan karakter bangsa, belum semua guru memahami kondisi penyandang cacat. Orangtua para penyandang cacat belum siap menerima anaknya mengikuti pendidikan di sekolah reguler, guru di sekolah reguler masih ada yang belum menerima kehadiran penyandang cacat. Kepala sekolah dan pihak birokrasi belum memahami tujuan pendidikan untuk semua. Sistem kenaikan kelas dan penilaian hasil belajar masih menjadi kendala di sekolah yang penyelenggara pendidikan bagi penyandang cacat. Pelaksanaan UN, sangat meresahkan pihak sekolah dan masyarakat, timbul kekhawatiran akan mempengaruhi peringkat sekolah. Hasil Pembahasan merekomendasikan berdasarkan konsep kebijakan Direktorat PSLB (2009): Apabila siswa penyandang cacat menggunakan model kurikulum reguler penuh, maka penilaiannya menggunakan sistem penilaian belajar siswa yang berlaku di sekolah reguler. Apabila siswa penyandang cacat menggunakan kurikulum reguler yang dimodifikasi, maka penilaiannya menggunakan model kurikulum reguler yang dimodifikasi. Apabila siswa penyandang cacat menggunakan kurikulum individual, sesuai dengan penilaian hasil belajar siswa bersifat individu. Sistem kenaikan kelas menggunakan model kurikulum reguler penuh, apabila siswa penyandang cacat menggunakan kurikulum yang dimodifikasi, maka sistem kenaikan kelasnya dapat melalui (a) model kenaikan kelas atas dasar usia kronologis siswa (b) menggunakan kenaikan kelas reguler. Sistem Raport. Apabila menggunakan kurikulum reguler penuh, maka raport yang digunakan sama dengan raport reguler. Akan tetapi jika siswa penyandang cacat menggunakan kurikulum yang dimodifikasi, maka raport yang digunakan raport reguler yang diberi narasi. Sedangkan bagi siswa penyandang cacat yang menggunakan program pendidikan individual, maka raport yang digunakan adalah raport kuantitatif. Jadi implementasinya adalah: (1) bagi siswa penyandang cacat yang telah berhasil mencapai prestasi di bidang akademik sebagai bentuk penghargaan diberikan Ijazah, bagi siswa cacat yang telah berhasil meraih prestasi di bidang non akademik (keterampilan), maka bentuk penghargaan yang diberikan kepada siswa penyandang cacat di berikan sertifikat kompetensi/keterampilan

Kata kunci : Pendidikan Karakter Penyandang Cacat

A. Pendahuluan

Fenomena pendidikan untuk semua merujuk pada kebutuhan pendidikan untuk semua anak (Education for All) dengan fokus spesifik pada mereka yang rentan terhadap marjinalisasi dan pemisahan. Pendidikan untuk semua berarti sekolah harus

mengakomodasi semua anak (penyandang cacat), tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial-emosional, linguistik atau kondisi lainnya (Tarmansyah, 2003)

Sekolah reguler dengan orientasi pendidikan untuk semua adalah lembaga yang paling efektif untuk mengatasi diskriminasi, menciptakan komunitas ramah, membangun suatu masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua. Perlunya perhatian bagaimana sekolah-sekolah dapat dimodifikasi atau disesuaikan untuk meyakinkan bahwa pendidikan untuk semua relevan dengan konteks lokal, memasukan dan mendidik semua peserta didik dengan ramah dan fleksibel, sehingga mereka dapat berpartisipasi (Olsen, 2002)

Pendidikan untuk semua perlu dilaksanakan, hal ini didasarkan atas berbagai konvensi masyarakat internasional, bahwa pendidikan harus diberikan kepada semua anak, tidak terkecuali bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak yang mengalami gangguan fisik, dan/atau mental-intelektual. Sekolah tidak boleh menolak anak, termasuk anak-anak yang termajinalisasi, seperti anak jalanan, anak dari keluarga ekonomi lemah, anak dengan gangguan fisik, motorik, mental-intelektual, sosial, gangguan komunikasi, dan gangguan perilaku. Penerapan sistem pendidikan untuk semua ditujukan untuk pengembangan kebijakan, kurikulum, pelatihan guru, kapasitas bangunan. Keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan pendidikan untuk semua merupakan konsep dasar yang mendukung keberhasilan pendidikan.

Beberapa sekolah di Sumatera Barat yang telah ditetapkan sebagai sekolah uji coba pendidikan untuk semua dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sumatera Barat. Kondisi obyektif di lapangan bahwa sekolah-tersebut telah menerima anak-anak penyandang cacat, dengan berbagai kelainan atau gangguan, diantaranya tunanetra, tunarungu, tunadaksa, autisme, dan anak-anak dengan lambat belajar dan kesulitan belajar.

Pelaksanaan pendidikan untuk semua di Sumatera Barat telah berjalan sejak tahun 2003. Hasil monitoring dan evaluasi khususnya pemantauan hasil evaluasi akademik, dapat dilihat dari hasil raport anak-anak tersebut, hampir semua mata pelajaran nilainya dibawah rata-rata, namun ada anak-anak yang mampu mengikuti pembelajaran dengan hasil yang cukup baik. Hasil yang telah dicapai oleh anak-anak berkebutuhan khusus, diantaranya ; Penyandang Cacat pendengaran (tunarungu), Siswa

SMK (jurusan tata busana), lulus dengan nilai yang cukup baik dan masuk perguruan tinggi melalui jalur PMDK, sementara penyandang cacat tunarungu lainnya saat ini mengikuti pendidikan di SMK (jurusan multi media), Selanjutnya di SMP Negeri anak yang didiagnosa penyandang autis, saat ini duduk di kelas III, dan kemampuan matematika dan bahasa Inggrisnya mampu menyaingi teman-temannya, dan telah lulus seleksi tingkat provinsi sebagai utusan ke tingkat nasional bidang keterampilan komputer.

Namun disamping keberhasilan, pelaksanaan pendidikan untuk semua masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik masalah internal sekolah maupun eksternal, diantaranya adalah orangtua yang mengeluh, dan menyalahkan pihak sekolah luar biasa yang mengirim anaknya untuk mengikuti sekolah reguler tersebut, sementara orangtua lain dari anak-anak reguler disekolah tersebut merasa kurang nyaman dan terganggu dengan hadirnya anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak mereka. Dari hasil wawancara dengan guru-guru yang berada di lingkungan sekolah, masih belum dapat menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus di kelasnya, dengan alasan mengganggu kegiatan belajar anak-anak lainnya.

Pihak birokrasi masih belum sepenuhnya memahami konsep pendidikan untuk semua, sehingga dukungan dalam pelaksanaan pendidikan tersebut belum optimal. Yang saat ini hangat menjadi pembicaraan masyarakat dan para birokrasi adalah masalah UN, sistem kenaikan dan tatalaksana penerimaan siswa baru di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan untuk semua.

B. Permasalahan

Masalah yang berkaitan dengan kemampuan akademik adalah, kurang berhasilnya anak-anak penyandang cacat dalam mencapai prestasi akademik, terutama ketika mengikuti UN, sehingga di sekolah menjadi dilema dan anak-anak tersebut dijadikan kambing hitam sebagai penyebab menurunnya rangking sekolah penyelenggara pendidikan untuk semua. Adapun permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan pendidikan untuk semua, khususnya di Sumatera Barat, adalah sebagai berikut ;

1. Guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran mengacu kepada kurikulum yang digunakan di sekolah tersebut tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan

individu penyandang cacat, guru-guru di sekolah penyelenggaran pendidikan untuk semua, umumnya belum memahami strategi modifikasi kurikulum yang sesuai dengan kemampuan individu penyandang cacat.

2. Latar belakang pendidikan guru pembimbing khusus tidak selalu sesuai dengan spesialisasi yang diampunya, sehingga proses pembelajaran dan layanan menjadi terhambat
3. Orangtua dari para penyandang cacat masih belum siap menerima sepenuhnya anaknya mengikuti pendidikan di sekolah reguler, khawatir dilecehkan kawan-kawannya.
4. Masih ada guru di sekolah reguler yang belum menerima kehadiran anak penyandang cacat
5. Kepala sekolah dan pihak birokrasi belum memahami sepenuhnya visi, misi, tujuan dan tatalaksana sistem pendidikan untuk semua sehingga dukungannya belum optimal
6. Sistem kenaikan kelas masih menjadi kendala di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan untuk semua.
7. Penilaian hasil belajar, terutama yang berkaitan dengan UN, sangat meresahkan pihak sekolah dan masyarakat, timbul kekhawatiran akan mempengaruhi peringkat sekolah yang saat ini sekolah-sekolah berlomba untuk mencapai prestasi terbaik. Bahkan untuk masuk sekolah TK, SD, SMP ada yang mensyaratkan melalui tes terlebih dahulu. Mereka yang diterima adalah anak-anak yang mempunyai kemampuan terbaik, Pertanyaannya dimana tempatnya anak-anak berkebutuhan khusus /dan atau anal-anal yang tidak mampu mengikuti tes.

Makalah ini bertujuan mencari jalan keluar dalam menemukan strategi membangun karakter penyandang cacat dalam menghadapi tantangan masa depan, dengan dikembangkannya paradigma pendidikan untuk semua, yang cenderung dihadapkan dalam berbagai masalah.

C. Pembahasan

Pelaksanaan pendidikan untuk semua sudah tidak diragukan lagi untuk dilaksanakan dan bagi personal yang melaksanakannya dengan ikhlas tugas ini akan

menjadi ladang ibadah (Soleh Moch, 2002). Pendidikan untuk semua di Indonesia mengacu kepada kebutuhan belajar untuk semua (*education for all*), dengan suatu fokus spesifik yang rentan terhadap marjinalisasi dan pemahaman. Prinsip pendidikan untuk semua pertama kali diadopsi pada konverensi dunia di Salamanca tentang pendidikan kebutuhan khusus tahun 1994.

Olsen (2002 : 3) mengemukakan : Pendidikan untuk semua berarti sekolah harus mengakomodasikan semua anak, termasuk penyandang cacat, tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lainnya. ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat dan berbakat anak-anak jalanan dan pekerja, anak yang berasal dari populasi terpencil atau yang berpindah-pindah, anak dan kelompok etnis minoritas, linguistik atau budaya dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termarginalisasi.

Inti pendidikan inklusif adalah hak azasi manusia atas pendidikan yang dituangkan pada Deklarasi Hak Azasi manusia tahun 1949 yang sama pentingnya adalah hak anak agar tidak didiskriminasikan, hal ini dimuat dalam artikel 2 Konvensi Hak Anak (PBB, 1989). Suatu konsekuensi logis dan hak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang tidak didiskriminasikan dengan dasar kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin kemampuan dan lain lain. Dokumen-dokumen tersebut menggambarkan konsensus masyarakat dunia mengenai arah masa depan pendidikan bagi individu yang membutuhkan layanan khusus

Peranan sekolah dalam pendidikan untuk semua. Agar menjadi kenyataan, maka pendidikan untuk semua harus mampu merubah dan menjamin semua pihak untuk membuktikan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Maka tugas dan kewajiban sekolah yang menyelenggarakan pendidikan untuk semua adalah, seperti yang dikemukakan Ahuya (2003): Mengubah sikap siswa, guru, orang tua dan masyarakat, menjamin semua siswa mempunyai akses terhadap pendidikan dan mengikutinya secara rutin, menjamin semua siswa diberi kurikulum penuh yang relevan dan menantang. Membuat rencana kelas untuk seluruhnya. Menjamin dukungan dan bantuan yang tersedia (teman sebaya, guru, spesialis, orang tua dan masyarakat). Menjamin semua siswa menyelesaikan sekolah dan mereka yang putus sekolah diberikan kesempatan untuk meneruskan sekolah. Memperbaiki pencapaian dan kesuksesan semua siswa pada

semua level. Menjamin pelatihan aktif berbasis sekolah. Menggunakan metode yang fleksibel dan mengubah kelompok belajar. Menjamin terlaksananya pembelajaran yang aktif. Menjamin adanya ekspektasi yang tinggi bagi semua siswa

Pengaruh positif pendidikan untuk semua menurut Hildegum Olsen (2002: 1904): Bagi siswa, sejak dini siswa memiliki pemahaman yang baik terhadap adanya perbedaan dan keberagaman, munculnya sikap empatik pada siswa terdorong secara alamiah, munculnya budaya saling menghargai dan menghormati antara siswa, mengurangi terjadinya stigma dan labeling kepada semua anak, khususnya pada anak tertentu, Timbulnya budaya kooperatif dan kolaboratif diantara siswa, sehingga memungkinkan adanya saling bantu satu sama lain.

Bagi guru, lebih tertantang untuk mengembangkan berbagai metode dalam pembelajaran untuk semua anak, bertambahnya kemampuan dan pengetahuan guru tentang keberagaman siswa termasuk keunikan, karakteristik dan sekaligus kebutuhannya, bertambahnya pemahaman bahwa siswa memberikan informasi kepada guru. Menumbuh kembangkan sikap empati guru terhadap siswa yang didalamnya termasuk siswa berkebutuhan khusus,

Bagi ororitas pendidikan, memberikan kontribusi bagi program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, memberikan peluang terjadinya pemerataan pendidikan bagi semua kelompok masyarakat, mengakomodasi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan pembelajaran yang lebih aktif kreatif serta menyenangkan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran, khususnya guru yang ramah dalam pembelajaran "wellcoming teachers" dalam pelaksanaan pendidikan untuk semua, seperti yang dikemukakan Olsen (2002): 1) Menghargai anak tidak dilihat dan kecacatan atau kebutuhan pendidikan khususnya, namun dilihat dan kemampuan atau potensi yang bisa dikembangkan pada didik anak. 2) Persamaan yang ada pada siswa lebih penting dari pada perbedaan, hingga menggunakan pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 3) Memberikan kurikulum utama termasuk sains dan sains terapan, kelas-kelas praktik, matematika dan bidang akademik lainnya dengan

membuat modifikasi yang sederhana dan rendah biaya. 4) Hak yang sama untuk anak penyandang cacat dengan tujuan konsistensi karir, minat dan kemampuan 5) Menjadikan tempat yang sesuai di kelas untuk anak penyandang cacat dan menjamin kondisi untuk mendengar dan melihat dengan baik, sehingga guru bisa dengan mudah membantu mereka. 6) Menjamin anak penyandang cacat untuk tidak diabaikan tapi menjadi bagian integral kelas tersebut. 7) Suatu kelas yang berjalan secara kooperatif dengan tingkat kompetensi yang sewajarnya 8) Menciptakan suatu atmosfir dimana semua anak menawarkan dan menerima bantuan satu sama lain. Anak penyandang cacat juga memberi dan menerima bantuan. 9) Adanya pengakuan dari perguruan tinggi universitas bahwa beberapa anak yang diharuskan melaksanakan sejumlah tugas dengan standar yang berbeda. Perbandingan dengan anak lain tidak diberikan standar terlalu tinggi, 10) Menggunakan bermacam-macam metode termasuk seluruh pekerjaan kelas dan jenis kerja kelompok yang berbeda-beda, 11) Merespon dengan positif terhadap pembelajaran di kelas dan tidak mengikuti bahan kurikulum secara kaku.

Kurikulum dalam pendidikan untuk semua hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan anak penyandang cacat. Selama ini anak dipaksakan harus mengikuti kurikulum. Oleh sebab itu sekolah hendaknya memberikan kesempatan untuk menyesuaikan kurikulum dengan anak penyandang cacat yang memiliki berbagai kemampuan, bakat dan minat. Bagi penyandang cacat disediakan dukungan berkesinambungan berupa bantuan minimal di kelas reguler, sehingga program pelajaran tambahan di sekolah itu dapat diberikan secara optimal, dan bila diperlukan dengan penyediaan bantuan guru pembimbing khusus

Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat strategis di sekolah, karena kurikulum dipersiapkan sebagai bahan ajar sebelum proses belajar mengajar. Kurikulum dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa penyandang cacat. Sejak dilaksanakannya kebijakan pemerintah tentang manajemen berbaris sekolah (MBS) pada tahun 2001 untuk menjamin otonomi sekolah, dan mulai dikembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006, tujuannya adalah menjamin satuan pendidikan/sekolah membuat kurikulum sendiri, maka kedua kebijakan pemerintah tersebut matching dengan karakteristik layanan pendidikan pada setiap sekolah yang

menyelenggarakan pendidikan untuk semua. KTSP disusun dan dikembangkan oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan semua peserta didik.

Pada prinsipnya kurikulum yang digunakan di sekolah adalah sama dengan sekolah reguler, namun mengingat adanya keberagaman siswa dari segi kemampuan yang dimiliki dan kendala yang dialami siswa, maka dalam implementasinya kurikulum tersebut di modifikasi oleh pihak sekolah sehingga dapat memenuhi kebutuhan individu siswa yang beragam.

Direktorat PSLB (2009), telah memberikan rekomendasi tentang Pengembangan Kurikulum di Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan untuk semua sebagai berikut : Secara kongkrit kurikulum di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan untuk semua di dibagi menjadi tiga model:

1.. Model Kurikulum

- a Model kurikulum reguler penuh. Dengan menerapkan model ini, berarti semua peserta didik termasuk anak penyandang cacat menggunakan kurikulum yang sama di sekolah umum, karena seluruh siswa memiliki tingkat intelegensi sama atau rata-rata.
- b. Model kurikulum reguler yang dimodifikasi. Dalam model kurikulum ini, guru memodifikasi materi pembelajaran, strategi pembelajaran, jenis penilaian dan program tambahan lainnya mengacu pada kebutuhan peserta didik, karena di dalam kelas/sekolah tersebut tingkat intelegensi siswa heterogen yakni ada yang dibawah atau bahkan di atas rata-rata/biasa (gifted and talented).
- c. Model kurikulum program pendidikan individual (PPI). Model ini dikembangkan untuk peserta didik yang memiliki hambatan belajar, sehingga siswa tidak memungkinkan untuk mengikuti proses belajar menggunakan kurikulum reguler/umum.

2. Model Evaluasi Hasil Belajar :

- a. Penilaian. Evaluasi hasil belajar siswa atau penilaian pada sekolah inklusif, tentu harus selaras dengan model kurikulum yang digunakan siswa. Jadi konsep berfikirnya sebagai berikut: 1) Jika siswa menggunakan model kurikulum reguler

penuh, maka penilaiannya menggunakan sistem penilaian belajar siswa yang berlaku di sekolah reguler; 2) jika siswa menggunakan kurikulum reguler yang dimodifikasi, maka penilaiannya menggunakan model kurikulum reguler yang dimodifikasi/disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan siswa; 3) jika siswa menggunakan kurikulum individual, maka penilaian hasil belajar siswa bersifat individu, dan didasarkan pada kemampuan dasar siswa. b. Sistem kenaikan kelas. Jika siswa menggunakan model kurikulum reguler penuh, maka sistem kenaikan kelasnya menggunakan sistem yang berlaku di sekolah reguler. Tetapi jika siswa menggunakan kurikulum yang dimodifikasi, maka sistem kenaikan kelasnya dapat melalui dua alternatif: 1) model kenaikan kelas atas dasar usia kronologis siswa 2) menggunakan kenaikan kelas reguler. Khusus bagi siswa yang menggunakan kurikulum individual, maka kenaikan kelas harus berdasarkan usia kronologis.

c. Sistem Raport. Jika siswa menggunakan kurikulum reguler penuh, maka raport yang digunakan sama dengan raport reguler penuh. Akan tetapi jika siswa menggunakan kurikulum yang dimodifikasi, maka raport yang digunakan adalah raport reguler yang diberi narasi untuk menggambarkan kualitas kemajuan belajar siswa. Sedangkan bagi siswa yang menggunakan program pendidikan individual, maka raport yang digunakan adalah raport kuantitatif dilengkapi dengan narasi. Penentuan nilai kuantitatif didasarkan pada kemampuan dasar anak.

d. Sistem Sertifikasi. Sertifikasi yang diberikan siswa mengacu pada pasal 61 UU Nomor 20 tahun 2003 yakni berupa ijazah dan sertifikasi kompetensi. Jadi implementasinya adalah: 1) bagi siswa yang telah berhasil mencapai prestasi di bidang akademik yang ditandai dengan lulus menempuh ujian nasional/sekolah, maka sebagai bentuk penghargaan siswa diberikan Ijazah, karena telah berhasil mencapai kompetensi pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan standar penilaian yang berlaku; 2) bagi siswa yang telah berhasil meraih prestasi di bidang non akademik (keterampilan), maka bentuk penghargaan yang diberikan kepada siswa sebagai tanda telah mampu meraih prestasi tertentu (seni, olah raga, mekanik, otomotif, dan jenis kompetensi lainnya) di berikan sertifikat kompetensi/keterampilan.

Menurut Statistik Persekolahan di Direktorat Pembinaan SLB, Ditjen Mandikdasmen, jumlah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan untuk semua di Indonesia tahun 2007 telah mencapai 814 sekolah (tidak termasuk TK/RA/BA Inklusif). Agar sekolah tersebut diharapkan sustainable, maka program pembinaan yang dilakukan pemerintah melalui Ditjen Mandikdasmen pada tahun 2009, antara lain: 1) penyelenggaraan workshop pengembangan pendidikan untuk semua; 2) sosialisasi perluasan akses dan mutu pendidikan untuk semua; 3) lomba kompetensi keterampilan khusus; 4) pengadaan naskah pedoman manajemen sekolah; 5) temu ilmiah pengembangan pendidikan untuk semua; 6) pendidikan keterampilan bagi siswa di sekolah.

Kemudian, 7) pengadaan alat keterampilan kelas/sekolah; 8) pengadaan film tentang pendidikan untuk semua; 9) penyediaan alat bantu khusus bagi sekolah ; 10) subsidi operasional penyelenggaraan sekolah ; 11) subsidi pembangunan ruang khusus bagi sekolah ; 12) subsidi pengembangan elearning (ICT) sekolah; 13) subsidi bagi rintisan sekolah; 14) subsidi pengelolaan sekolah; 15) workshop bagi kelompok kerja pendidikan untuk semua; 16) pemantauan pelaksanaan kegiatan pendidikan untuk semua; 17) monitoring dan evaluasi pengembangan pendidikan untuk semua.

371.91

TAR

P-1

BANK PERPUSTAKAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JANUARI 2009

RUJUKAN

- Anscow, Mel. (1997). Towards Inclusive Scholing, Article in British Journal of Special Education No 1/1977; 3-6
- Anupan Ahuya, Dkk. (2005) Abstracts International Symposium “ *Inclusion and the Removal of Barriers to Learning, Participation and Development*, West Sumatera Indonesia
- Berit H.Johnsen (2003). *Pengenalan Sejarah Pendidikan Kebutuhan Khusus menuju Inklusi, sebuah konteks Norwegia dan Eropa* (Introduction to History of Special Need Education toward Inclusion). PPS. Universitas Pendidikan Indonesia Press. Bandung.
- Depdiknas. 2003. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdiknas
- Direktorat PSLB, 2009. *Kurikulum Pendidikan Untuk nsemua / Inklusif*, Kebijakan Direktorat PSLB, Jakarta
- Daid J. Smith, Dean. (1998) *Inclusion schools for all Students*, International Thomson Publishing. CA Academic Press.
- Jaja Rahaja (2003) *Latihan bagi Tunanetra (Low Vision Training)* PPS. Prog. PKh Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
- Olsen, Hildegun. 2002. *Pendidikan Inklusif suatu Sfrategi manuju Pendidikan untuk Semua* (Materi Lokakarya) Mataram : Direktorat PSLB
- Skjorten, Miriam D. 2002. *Peran Universitas dalam Mempromosikan Pendidikan Untuk Semua dalam Laingkungan yang Akrab dan Inklusif*; Mataram : Direktorat PSLB
- Soleh, Moch. 2002. *Proses Menciptakan Pendidikan Inklusif dan Lingkungan Pembelajaran yang Akrab di Sekolah Dasar*, Mataram Direktont PSLB